

WACANA REFORMASI DI MEDIA MASSA

(Refleksi Enam Tahun Jatuhnya Soeharto)

Oleh Aprinus Salam

Pada awal Mei 1998 reformasi pernah dimaknai sebagai "turunkan Soeharto". Pergerakan arti sehingga bermakna "turunkan Soeharto" tidak terjadi begitu saja. Proses mobilisasi dan pembentukan makna yang eksplisit itu merupakan hasil tawar-menawar di antara berbagai kenyataan, kekuatan, kepentingan, dan wacana-wacana yang berkembang pada waktu itu. Karena merupakan proses tawar-menawar yang secara signifikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia wacana "turunkan Soeharto" berimplikasi sangat kuat dan membentuk perilaku masyarakat Indonesia melakukan pendobrokan dan pembongkaran terhadap tatanan kekuasaan Orde Baru. Hasil puncak dari kekuatan wacana tersebut adalah pada tanggal 21 Mei 1998 yaitu mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden Indonesia.

Proses bergulirnya wacana reformasi hingga mencapai pada pemaknaan-pemaknaan baru dan eksplisit itu dimulai pada tahun 1989. Pada 6 April 1989, Soedomo, yang waktu itu menjabat sebagai Menkopolkam pernah melontarkan sebuah isu perlunya suksesi. Soedomo melihat bahwa bangsa Indonesia perlu mempersiapkan generasi penerus untuk memimpin bangsa Indonesia agar siap menghadapi masa depan. Akan tetapi, beberapa hari kemudian Soedomo meminta maaf kepada Soeharto atas pernyataannya itu (Kompas, 13 April 1989). Yang jelas isu itu sempat menjadi wacana dan polemik di media massa lebih kurang selama dua setengah bulan, mulai dari pertengahan April hingga akhir Juni 1989. Isu dan wacana suksesi setelah Juni 1989 mereda, dan tidak ada perbincangan yang signifikan ke arah itu.

Pada tahun 1993 di Surabaya, Amien Rais secara mengejutkan kembali mengeluarkan isu suksesi. Amien Rais mengatakan bahwa jika proses suksesi tidak dipersiapkan, Indonesia yang waktu itu berpenduduk lebih kurang 180 juta jiwa, tidak akan memiliki pemimpin sekaliber Soeharto. Menurut Amien hal tersebut merupakan

tanda-tanda tidak baik. Lebih jauh Amien mengatakan akan terjadi sesuatu yang serius jika pada saatnya Soeharto tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya, sementara tidak ada seorang pun yang layak menggantikannya, akan terjadi silang sengkabut perebutan kekuasaan. Pemerintah segera mengeluarkan wacana tandingan bahwa selama ini kepemimpinan Soeharto sangat sukses, pembangunan lancar, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat, politik berjalan stabil, kewibawaan kepemimpinan Soeharto diakui secara nasional dan internasional, sehingga jabatan kepresidenan Soeharto masih perlu dipertahankan. Kekuatan wacana tandingan versi pemerintah tersebut membuat isu yang ditawarkan oleh Amien Rais kembali tenggelam, tidak mampu menjadi suatu wacana yang signifikan dalam masyarakat Indonesia.

Pada awal 1997, suhu politik memanas sehubungan dengan akan diadakannya pemilu. Isu suksesi kembali bergaung menjelang pemilu tersebut. Di samping Amien Rais, beberapa kelompok kepentingan seperti mahasiswa, LSM, dan tokoh-tokoh maupun institusi-institusi independen lainnya mencoba mensosialisasikan wacana suksesi. Dalam kampanye pemilu tersebut PPP untuk pertama kalinya melebarkan isu suksesi dengan istilah reformasi. Amien Rais bahkan memberanikan diri mencalonkan diri menjadi presiden. Tindakan pencalonan itu, demikian Amien, lebih dalam rangka proses dan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia.

Isu dan wacana suksesi menjadi reformasi merupakan perluasan makna yang penting. Karena, seperti terbukti dikemudian hari, wacana reformasi inilah yang mengalami mobilisasi, perluasan, penggunaan/ penyalahgunaan, penyempitan, kontekstualisasi, ideologisasi, sesuai dengan kepentingan pelaku wacana (subjek/institusi pengguna tuturan), konteks paradigmatisnya (sebagai misalnya reformasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya), maupun konteks dalam pengertian situasi dan kondisi (meliputi aspek ruang dan waktu).

Akan tetapi, sebelum membicarakan hal tersebut lebih jauh, ada tahap-tahap lain yang terkait yang mengantarkan pada mobilisasi makna reformasi. Pada tahun

1997, Golkar kembali memenangkan pemilu secara mutlak. Dengan demikian, Jika Golkar menang wacana suksesi dan reformasi akan terbenam karena diperhitungkan Soeharto akan terpilih kembali menjadi presiden. Mahasiswa, tokoh-tokoh publik, dan masyarakat secara bersama-sama melakukan penolakan terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak jujur, tidak luber, terutama dengan mengadakan unjuk rasa, demonstrasi, bahwa sudah saatnya kepemimpinan Soeharto diganti. Skala demonstrasi mengalami peningkatan dan perluasan terutama setelah Soeharto dilantik menjadi presiden pada Maret 1998. Soeharto tampaknya tidak peduli dengan aspirasi masyarakat bahkan dengan terang-terangan memilih tim kabinetnya berdasarkan KKN.

Namun, pada tahun 1997 bukan saja peristiwa pemilu yang penting, tetapi ada peristiwa lain yang juga penting yaitu terjadinya krisis moneter yang mulai terjadi pada bulan Juli. Ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa terjadinya krisis moneter di Indonesia merupakan imbas dari krisis moneter di beberapa negara Asia pada umumnya seperti Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan Philipina. Anggapan lain mengatakan bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia dikarenakan fondasi makro perekonomian Indonesia rapuh. Terlepas dari anggapan tersebut, yang pasti adalah bahwa krisis moneter menyebabkan nilai tukar rupiah, berbanding dolar AS, turun drastis. Karena harga rupiah turun drastis, kualitas dan kuantitas perekonomian masyarakat menjadi turun, secara keseluruhan krisis moneter menyeret pada krisis ekonomi.

Pada akhir 1997 kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia semakin buruk. Karena mendapat tekanan, baik dari dalam negeri dan luar negeri, pada Oktober 1997 Soeharto menandatangani Program Paket Pemulihan Ekonomi yang ditawarkan oleh IMF yang meliputi penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, termasuk kurs mata uang, dan penyesuaian struktural. Akan tetapi, paket ini tidak jalan karena Soeharto tidak menepati program yang ditawarkan IMF tersebut. Menurut Soeharto paket IMF tersebut terlalu liberal, bertentangan dengan UUD'45, dan tidak sesuai dengan budaya ekonomi Indonesia.

Karena perekonomian semakin memburuk, pada tanggal 15 Januari 1998 Soeharto kembali disodori oleh IMF untuk mendandatangani LoI program pemulihan krisis ekonomi. Dalam penandatanganan LoI itu Soeharto menerima paket reformasi yang ditawarkan oleh IMF. Paket perbaikan ekonomi yang meliputi 50 butir pernyataan penyesuaian struktural yang ditawarkan IMF itu disebut paket reformasi ekonomi nasional. Pada minggu-minggu itu wacana reformasi bergeser dari sukseki kepemimpinan menjadi reformasi ekonomi.

Terbukti paket reformasi ekonomi yang ditawarkan IMF tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perdebatan seputar kegagalan paket program pemulihan krisis ekonomi yang ditawarkan IMF tersebut sempat menjadi polemik nasional. Berbagai wacana baru muncul. Salah satu yang terpenting adalah bahwa seretnya reformasi ekonomi membawa dampak yang luas yakni hadirnya wacana lain yang mengatakan bahwa reformasi ekonomi tidak mungkin terjadi jika tidak ada reformasi politik. Yang dimaksud dengan reformasi politik di sini adalah reformasi ke arah pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah yang bebas KKN, pemerintah yang dapat menegakkan hukum, pemerintah yang mampu menegakkan keadilan dan demokrasi, dan secara khusus adalah perbaikan lima paket UU Politik 1983. Jika wacana reformasi politik yang secara inheren meliputi hal itu tidak dapat dilakukan, dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi reformasi ekonomi. Dapat dikatakan, pada saat-saat itu wacana reformasi ekonomi selalu bergandengan dengan reformasi politik. Bahkan secara sinergis wacana reformasi ekonomi tersebut pada akhirnya selalu bergandengan pula dengan wacana-wacana lain seperti perlunya reformasi hukum, reformasi budaya, reformasi sistem (pemilu), dan reformasi ABRI.

Pada umumnya wacana reformasi yang berkembang menjelang dilantiknya Soeharto pada Maret 1998 masih berupa proses tawar menawar, proses dialog, dan saling merespon antar satuan-satuan wacana yang berlainan konteks kepentingan dan ideologinya. Proses tawar menawar dan dialog tersebut terutama meliputi berbagai wacana yang pernah ada dalam masyarakat Indonesia. Secara umum jika diklasifikasikan proses dialog antar wacana tersebut meliputi tujuan reformasi, syarat-

syarat terjadinya reformasi, cara reformasi tersebut direalisasikan, faktor-faktor yang mempengaruhi jalan dan arah reformasi, implikasi dari pilihan atau cara reformasi, hambatan-hambatan terhadap proses reformasi, maupun peluang terjadinya reformasi. Dari proses dialog antar wacana tersebut, yang terjadi adalah persaingan untuk memperebutkan agar sebuah wacana menjadi dominan. Seperti akan dijelaskan kemudian, teks-teks yang diteliti menunjukkan bahwa secara umum wacana yang eksplisit paling dominan dari tujuan reformasi adalah terbentuknya suatu masyarakat bangsa yang demokratis, berkeadilan, menjunjung tinggi hukum dan HAM, pemerintahan yang baik dan bersih/bebas KKN, maupun kuatnya masyarakat sipil, dan atau terbentuknya masyarakat madani. Teks-teks secara eksplisit menunjukkan bahwa cara tersebut harus ditempuh dengan cara yang konstitusional, dengan cara damai, dengan cara berdialog, secara gradual/bertahap, dengan cara tetap menjaga harmoni, tidak revolusioner, penyesuaian-penyesuaian struktural, dan sesuai dengan budaya ketimuran. Bahkan secara khusus cara sabar dan berdoa kepada Allah agar reformasi dapat segera menjadi kenyataan merupakan cara yang dapat diterima, sebuah wacana yang cenderung mesianistik.

Namun, secara implisit teks-teks menunjukkan bahwa suksesi tetaplah sebuah keharusan. Karena hanya dengan suksesilah diharapkan kehidupan akan kembali harmoni, dunia yang stabil, kehidupan yang damai dan sejahtera. Terjadi sesuatu yang kontradikdif dalam teks-teks implisit yaitu bahwa jika suksesi demi harmoni dan stabilitas tersebut tidak terjadi, maka untuk mencapainya jika perlu dengan cara kekerasan, dengan cara melakukan disharmoni, dengan cara revolusioner. Dalam konteks inilah, dalam proses dialog lebih lanjut, teks-teks implisit mendapatkan alasan dan ruang gerak yang semakin tidak terkontrol dalam melakukan mobilisasi, konvergensi, dan secara perlahan-lahan berpeluang menjadi teks-teks eksplisit.

Pada 10 Maret 1998 Soeharto dilantik menjadi presiden. Kepercayaan masyarakat terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik semakin menjadi wacana eksplisit. Di lain pihak, situasi politik dan ekonomi semakin kacau balau dengan terjadinya berbagai pergolakan, demonstrasi,

intrik-intrik di antara para elit politik, dan kerusuhan di berbagai tempat. Mobilisasi, penggunaan dan penyalahgunaan wacana dan makna reformasi semakin luas dan sekaligus menyempit (mulur mungkret). Semakin meluas jika wacana reformasi dikaitkan dengan tuntutan terhadap reformasi di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi, wacana reformasi mengalami penyempitan jika dikaitkan dengan keharusan untuk suksesi. Dalam konteks inilah pada awal Mei 1998 pada akhirnya wacana reformasi tersebut bergerak mungkret pada pemaknaan "turunkan Soeharto", atau bahkan "gantung Soeharto". Kekuatan wacana teks implisit dan eksplisit yang membentuk komposisi baru dan menyempit menjadi teks eksplisit terbukti memperlihatkan kemujarabannya.

Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Habibie. Prosesi suksesi tersebut sempat menimbulkan polemik dan wacana tersendiri, apakah konstitusional atau inskonstitusional. Dialog dan polemik yang sama-sama mencari legitimasi pada UUD'45 maupun UU di bawahnya saling bertarung memperebutkan pembuktian-pembuktian konstitusional atau inskonstitusional. Wacana ini akan menyita perhatian tersendiri, dan dalam berbagai proses pertarungan antar wacana tersebut, pergerakan wacana mengarah pada satu anggapan bahwa pemerintahan Habibie hanyalah pemerintahan transisi.

Selepas turunnya Soeharto, pada waktu-waktu berikutnya, terjadi perluasan wacana reformasi. Jika pada tahap sebelumnya adalah proses dialog antara berbagai kekuatan baik antara teks implisit maupun teks eksplisit yang berujung pada penyempitan makna secara eksplisit, maka pada tahap setelah turunnya Soeharto wacana reformasi, teks eksplisit dan implisit, mengalami perluasan ke berbagai arah dengan sejumlah harapan yang membesar. Teks-teks yang diperiksa memperlihatkan bahwa hampir semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu direformasi; seperti tuntutan reformasi ABRI (ABRI tidak perlu berpolitik dan kembali ke barak), pendidikan, pertanian, perpajakan, moral, sosial, pers, perbankan, perpajakan, koperasi, partai politik, pertanahan, kelembangaan, pangan, bahasa, berita, PWI, seni, dan sinetron. Beberapa tuntutan reformasi seperti reformasi ABRI,

pendidikan, moral, jauh hari sebelumnya sempat menjadi wacana, tetapi berbagai wacana tersebut tenggelam dengan wacana reformasi politik dan ekonomi. Perluasan konteks reformasi yang terkalahkan oleh wacana politik dan ekonomi itu lebih leluasa dan terarah untuk didiskusikan terutama setelah bulan Mei 1998.

Setelah Mei 1998, teks-teks juga menunjukkan bahwa terjadi apa yang disebut dengan euforia. Teks memeperlihatkan terjadinya harapan, dan sekaligus percaya diri, yang berlebihan terhadap kekuatan reformasi, bahwa semua hal sisa-sisa Orde Baru harus direformasi. Pemerintahan Habibie mengalami desakan yang besar untuk segera melakukan reformasi total, reformasi menyeluruh, dan segera. Karena, jika tidak, wacana reformasi akan kehilangan aktualitas, kehilangan konteks, kehabisan timing, dan ini akan berbahaya.

Posisi Habibie dalam ketegangan antara wacana konstitusional dan inskonstitusional membuat pemerintahannya tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tidak dianggap legitimate. Pemerintah Habibie mengalami kesulitan, ketidakpercayaan untuk melakukan reformasi. Harapan terhadap wacana reformasi yang demikian besar (euforia) membuat sebanyak apapun tindakan reformatif yang dilakukan Habibie, seperti perbaikan berbagai UU sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi, tidak pernah dianggap cukup, tidak pernah memuaskan.

Implikasi lain dari euforia reformasi adalah terjadinya mobilisasi pemaknaan reformasi sesuai dengan konteks yang menguntungkan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kerugian di lain pihak. Dengan bubarnya kekuasaan Soeharto, masyarakat merasa memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap semua tatanan yang diwariskan oleh Orde Baru. Apalagi, walaupun Soeharto telah turun, ternyata kehidupan ekonomi, politik, hukum tidak segera membaik. Habibie bahkan dianggap sebagai perpanjangan tangan Orde Baru.

Karena kekecewaan-kekecewaan yang semakin menumpuk, itulah sebabnya, wacana reformasi mengarah pada satu bentuk pengertian lain dengan munculnya tafsiran-tafsiran baru yang kelak menjadi wacana tersendiri. Satuan-satuan wacana tersebut antara lain bahwa reformasi berarti menjarah, reformasi sama dengan

refotnasi, berarti anarki, reformasi kebablasan, reformasi hanya menghasilkan anarki, reformasi hanya menambah kesengsaraan rakyat, reformasi tidak lebih baik dari jaman Orde Baru, dan reformasi salakaprah, munculnya reformis sejati dan gadungan, pemerintahan Habibie harus segera diganti karena berbau Orde Baru, tahun 1998 adalah tahun paling krusial, reformasi tidak bisa dijalankan secara tambal sulam.

Munculnya wacana-wacana baru tersebut tak pelak merupakan hasil dari pertarungan-pertarungan baru yang melibatkan berbagai kepentingan baru, ideologisasi baru, sesuai dengan perubahan struktur kekuasaan maupun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, struktur kekuasaan pusat melemah, tidak sekuat kekuasaan Orde Baru sehingga masyarakat memiliki keberanian-keberanian untuk melakukan upaya-upaya pendefinisian wacana reformasi sesuai dengan kepentingan kelompok dan interesnya. Kedua, sebagai implikasi dari sebab pertama, masyarakat terpecah belah dalam berbagai wacana antara, pada akhirnya, antara yang tetap pro reformasi dan kontra reformasi. Yang pro reformasi pun terpecah belah lagi antara mereka yang tetap pada jalur-jalur konstitusional dan yang tidak percaya pada jalur konstitusional. Mereka yang pro reformasi pada umumnya mengatakan bahwa sebab kegagalan reformasi karena pemerintah Habibie tidak menjalankan reformasi secara konsisten dan menyeluruh. Sementara itu, yang kontra reformasi mereka yang dirugikan oleh reformasi atau yang berpihak pada status-quo. Mereka yang kontra reformasi pada umumnya menampilkan wacana-wacana bahwa reformasi hanya menambah kesengsaraan rakyat, rezim Orde Baru lebih baik dari Orde Reformasi,

Persaingan antara wacana pro dan kontra reformasi inilah, pada gilirannya, bersaing dan "memain-mainkan" wacana dan menentukan perilaku dan kebijakan apakah dari pihak pemerintah, mereka yang tersingkir karena jatuhnya Soeharto, mereka yang melihat peluang untuk menduduki kekuasaan, maupun institusi-institusi lain seperti mahasiswa, LSM, ormas ataupun orsospol, dan tokoh-tokoh politik atau publik. Yang menarik adalah terjadinya upaya-upaya penyatuan wacana antara beberapa kelompok kepentingan yang berbeda yang melibatkan Amien Rais,

Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Sri Sultan HB X. Tokoh-tokoh politik nasional yang tersebut mengeluarkan wacana "8 Butir Kesepakatan" yang disebut Deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998. Dapat diperhitungkan bahwa upaya penyatuan berbagai wacana dari kelompok kepentingan yang berbeda ideologi, visi reformasi, massa pendukung, maupun posisi sosial politik tersebut akan menjadi satu kekuatan wacana yang kuat dan menentukan di masa-masa kemudian.

Persaingan, persebaran, dan penyatuan antar wacana tersebut menghadirkan beberapa ramuan wacana baru. Pertama, seperti telah disinggung, pemerintahan Habibie hanya transisi. Kedua, masyarakat bebas berekspresi dan menyalurkan aspirasinya secara terbuka dan konstitusional. Ketiga, reformasi harus tetap ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab. Keempat, kegagalan reformasi bukan kesalahan pemerintah saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat belum siap direformasi. Kelima, perlunya pemimpin masa depan yang reformis. Keenam, wacana-wacana yang bersifat religius seperti bangsa Indonesia masih dalam cobaan, dan sebagainya. Pemerintahan Habibie pada akhirnya juga memutuskan untuk melakukan pemilu yang dipercepat. * * *

Aprinus Salam, peneliti di UGM, Yogyakarta,